

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

##### 1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari Bahasa Arab, “*Funduq*” yang berarti tempat menginap, atau asrama.<sup>1</sup> Sedangkan pesantren berasal dari Bahasa Indonesia, dari kata santri, diimbui awalan *pe* dan akhiran-*an* yang berarti para penuntut ilmu.<sup>2</sup>

Menurut istilah, pondok pesantren adalah “lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”.<sup>3</sup>

Jadi pondok pesantren merupakan tempat menginap yang disediakan bagi para penuntut ilmu. Dengan adanya tempat menginap ini diharapkan bagi para santri bisa menuntut ilmu secara maksimal dan bisa menjadi gerasi ulama yang *Ibaadillaa hissolihinn*.

---

<sup>1</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LPES. 2011), 145.

<sup>2</sup> Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 7.

<sup>3</sup> Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan pesantren* (Jakarta: KDT, 1994), 3.

## 2. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan di samping ada faktor khusus, berupa pendidikan, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan, yang kesemuanya ini tidak akan ada artinya tanpa diarahkan oleh tujuan. Sehingga tujuan merupakan hal penting dalam proses pendidikan. Karenanya baik materi, metode dan alat pengajaran ini harus menyesuaikan dengan tujuan. Akan tetapi, jika tujuan justru tidak jelas, maka yang ada hanya akan mengaburkan seluruh aspek tersebut.

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua lini kehidupan serta menjadikannya manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah:

1. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
2. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim selaku kader-kader ulama dan *mubaligh* yang berjiwa ikhlas, tabah, sabar, tangguh dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis.
3. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan dan menjadi diri yang bertanggung jawab.
4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat/lingkungannya).
5. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.

6. Mendidik santri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam usaha pembangunan masyarakat dan bangsa.<sup>4</sup>

Kemudian terdapat tiga fungsi pesantren yang menjadi karakteristik di lembaga pendidikan pondok pesantren, yakni transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, memelihara tradisi Islam dan reproduksi ulama.<sup>5</sup>

### 3. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren

Sistem yang diterapkan dalam pesantren berbeda dari pendidikan pada umumnya, yaitu:

- a. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kyai.
- b. Kehidupan di pesantren nampak semangat demokratis karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problema non kurikuler.
- c. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, penanaman rasa percaya diri dan keberanian hidup.<sup>6</sup>

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren adalah metode *wetonan*, *sorogan* dan hafalan.<sup>7</sup>

### 4. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren, keberadaannya tidak hanya sebagai aktivitas transfer ilmu saja, melainkan juga sebagai kaderisasi ulama dan sebagai pemelihara budaya Islam. Dua unsur tambahan tersebut perlu ditekankan karena seorang ulama bukan sekadar orang

---

<sup>4</sup>Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi*, 6.

<sup>5</sup>Ibid., 120.

<sup>6</sup>Enung K Rukiat & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 104.

<sup>7</sup>Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 287.

dengan penguasaan ilmu yang tinggi, melainkan juga harus mampu mengamalkan ilmu tersebut. Pesantren lahir karena sadar akan kewajiban dakwah islamiyah, artinya kewajiban menyebarkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader yang bisa menyebarkan ilmu agama. Oleh sebab itu, terdapat beberapa peran dan fungsi pesantren, diantaranya sebagai lembaga keagamaan, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga sosial, dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan

Pondok pesantren memiliki peranan yang besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya adalah sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, juga sebagai lembaga pemberdayaan umat. Peran lainnya yaitu dapat memobilisasi masyarakat dalam perkembangan mereka, artinya lembaga ini dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat bahwa pondok pesantren merupakan tempat yang tepat untuk belajar akhlak dan budi pekerti yang baik.<sup>8</sup>

Agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri supaya dapat menjamin keselarasan, keseimbangan dan keserasian, sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat

---

<sup>8</sup>Wahyu Nugroho, "Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagamaan Remaja": Mudarris: *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2016, 5

dalam mencapai kemajuan, baik *lahiriyah* maupun kebahagiaan *battiniyah*.<sup>9</sup>

## 2. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), memiliki model-model pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu sistem pendidikan dengan metode pengajaran *wetonan* dan *sorogan*.<sup>10</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama Islam, yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti, melalui terciptanya pribadi muslim yang berindikator iman, taqwa, ta'at menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren menyelenggarakan lembaga pendidikan formal (madrasah, baik diniyah, stanawiyah maupun aliyah; sekolah umum; kejuruan dan perguruan tinggi) serta pendidikan luar sekolah berupa kursus-kursus keahlian (*life skill*) untuk menunjang kehidupan santri pasca mengikuti pendidikan di pesantren tersebut. Hal ini karena pesantren tidak mencetak santrinya

---

<sup>9</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 87.

<sup>10</sup>Enung K Rukiat & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 104.

untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi lebih menitikberatkan kepada kemandirian santri dan selalu membekali santri dengan pendidikan kewirausahaan kepada dengan bentuk *life skill* yang diberikan oleh masing-masing pondok pesantren.

### 3. Pondok pesantren sebagai lembaga dakwah

Sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren juga ikut terlibat dalam usahanya membangun masyarakat. Maksudnya, pondok pesantren menerapkan beberapa aktivitas dengan tujuan menumbuhkan kesadaran beragama masyarakat supaya dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam.<sup>11</sup>

Selain itu, sebagai pusat penyebaran agama Islam, baik dalam masalah aqidah atau syari'ah di Indonesia, pesantren juga otomatis berfungsi sebagai lembaga penyiar agama (lembaga dakwah), yang dalam hal ini terlihat dari salah satu elemen pondok pesantren, yakni masjid pesantren. Secara operasional, masjid pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum. Hal ini karena masyarakat sering kali menggunakan masjid pesantren untuk menyelenggarakan majelis *ta'lim* (pengajian), diskusi-diskusikeagamaan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., 38.

<sup>12</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 61.

#### 4. Pondok pesantren sebagai lembaga sosial

Memenuhi tanggung jawabnya lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tua mereka.<sup>13</sup>

Tugas kemasyarakatan pesantren sebenarnya tidak mengurangi arti tugas keagamaannya, karena dapat berupa penjabaran nilai-nilai hidup keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan fungsi sosial ini, pesantren diharapkan dapat peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalankemasyarakatan, seperti memelihara tali persaudaraan, mem-berantas kebodohan dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Hampir kita temukan masyarakat di sekitar pesantren relatif lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat yang jauh dari pesantren. Hal ini karena tidak terlepas dari peran pondok pesantren dalam membangun masyarakat melalui pesan-pesan agama. Dari hal semacam inilah yang akhirnya membuat masyarakat merasa dekat dan senang terhadap keberadaan pesantren, ditambah lagi pesantren mampu menunjukkan dan mempertahankan kualitas dan kuantitasnya di tengah masyarakat.

---

<sup>13</sup>Ibid., 60.

<sup>14</sup>M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia pesantren*(Jakarta: P3M, 1985), 17.

## B. Tinjauan Tentang Madrasah Diniyah

### 1. Pengertian Madrasah Diniyah

Kata “madrasah” dalam Bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*dharaf makan*) dari kata “*darasa*”, yang secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran.<sup>15</sup> Dari akar kata “*darasa*” juga bisa dari kata “*Midras*” yang artinya buku yang dipelajari dan tempat belajar.<sup>16</sup>

Menurut Muhaimin, madrasah adalah *isim makan* dari kata: *daras-yadrusu-darsan wa darusun*, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih mempelajari. Madrasah dilihat dari pengertian di atas, berarti tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan serta melatih keterampilan siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, mendefinisikan Diniyah taklimiyah yang selanjutnya disebut madrasah diniyah taklimiyah, adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara

---

<sup>15</sup>Abdurrahman Mas`ud, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, 211.

<sup>16</sup>Ahmad. Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 3397-398.

<sup>17</sup>Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 183-184. Baca juga Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 59.

terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.<sup>18</sup>

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa madrasah diniyah takmiliyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan non formal yang menggunakan metode klasikal dengan pembelajaran materi keagamaan lengkap dan padat, sehingga santri belajar di madrasah dapat lebih mendalam pemahamannya terhadap ilmu-ilmu agama.

## 2. Bentuk-Bentuk Madrasah Diniyah

Madrasah sebagaisuatu sistem pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan non keagamaan.<sup>19</sup> Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah dikenal sejak awal perkembangan Islam di Nusantara. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama dan dukungan pemerintah, sebagian lembaga pendidikan keagamaan yang beragam, bersentuhan dengan metode pendidikan klasikal modern yang terprogram sehingga lahirlah madrasah diniyah.<sup>20</sup> Pendidikan keagamaan nonformal diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Madrasah diniyah takmiliyah.
- b. Pendidikan Al-Quran.
- c. Majelis ta'lim.

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 1 Ayat 10.

<sup>19</sup>Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1999), 97.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2014), 1-2.

d. Pendidikan keagamaan Islam lainnya.

Sedangkan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada poin pertama, dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara berjenjang, sebagaimana berikut:

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar.
2. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho (MDTW) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
3. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho.<sup>21</sup>

### 3. Fungsi Madrasah Diniyah

Adapun fungsi madrasah diniyah, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Agama Islam bagi yang memerlukan.
2. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, antara lain: membantu membangun dasar yang kuat bagi pembangunan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dan membantu mencetak warga Indonesia takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain.
3. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam.
4. Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan.<sup>22</sup>

Sedangkan fungsi dari pendidikan keagamaan, yakni mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, ayat 1 Pasal 45. Baca juga Dawlay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 63.

<sup>22</sup>Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 42.

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.<sup>23</sup>

Dengan demikian, di samping madrasah diniyah berfungsi sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam, juga berfungsi sebagai sarana untuk membina *akhlak al-karimah* (akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan Pendidikan Agama Islam di sekolah sekolah umum.

#### **4. Tujuan Madrasah Diniyah**

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, maksud dan tujuan madrasah diniyah juga tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam dan tujuan Pendidikan Nasional, mengingat pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional.<sup>24</sup>

Dengan demikian, tujuan dari pendidikan keagamaan ini adalah mengupayakan terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.<sup>25</sup>

Oleh karenanya, tujuan dari adanya madrasah ini, siswa bisa memiliki ilmu pengetahuan tentang keagamaan yang mendalam dan bisa di sebarkan ke tengah masyarakat, utamanya pada lingkungan

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

<sup>24</sup>Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, 114-115.

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

sekitar mereka kelak, dalam rangka memahami masyarakat yang tidak paham ilmu agama dan ini merupakan kewajiban orang-orang ahli ilmu khususnya orang-orang yang ahli ilmu agama.

## **5. Kurikulum Madrasah Diniyah**

Kurikulum merupakan esensi dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada Madrasah Diniyah Takmiliah, kurikulum yang dijalankan adalah dengan mengembangkan prinsip-prinsip berikut:

1. Fleksibilitas, menitikberatkan kepada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang diperhatikan adalah bagaimana guru dan santri bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga materi yang diberikan bisa benar-benar dipahami.
2. Berorientasi pada tujuan, bahkan lebih baik jika tujuan yang ditetapkan berdasar atau berorientasi kepada lingkungan sekitar, dimana tempat anak akan kembali akhirnya. Sehingga pemilihan atas kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar dapat didasarkan kepada ilmu pengetahuan perkembangan masyarakat.
3. Efektifitas dan efisiensi, struktur Madrasah Diniyah Takmiliah merupakan pelengkap dari pendidikan formal yang di dapat siswa pada lembaga formal, sehingga memerlukan keterampilan tersendiri dan pengorganisasian agar waktu yang ada untuk pembelajaran itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

4. Kontinuitas, kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dikembangkan dengan pendekatan hubungan hirarki fungsional yang menghubungkan antarjenjang, yakni MDTA, MDTW dan MDTU. Sehingga perencanaan kegiatan belajar mengajar harus dibuat seoptimal mungkin dan sistematis.
5. Pendidikan seumur hidup, pendidikan merupakan kewajiban utama bagi umat Islam. Bahkan Dalam islam diwajibkan bagi muslim dan muslimah untuk mencari ilmu sejak dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Selogan masyarakat dunia "*education forl all*".<sup>26</sup>

Sedangkan kurikulum yang ada di pondok pesantren tradisional, lebih memilih mandiri dalam bahan ajarnya, seperti kitab-kitab klasik yang biasa digunakan di pondok pesantren salaf.

## **6. Urgensi Madrasah Diniyah**

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan untuk melatih anak didiknya dengan sedemikian rupa sehingga dalam membentuk sikap hidup, tindakan dan pendekatannya terhadap segala jenis pengetahuan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etika Islam. Mentalnya dilatih sehingga keinginan mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektualnya saja atau hanya untuk memperoleh keuntungan material semata, melainkan untuk

---

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah*, 2014, 20.

mengembangkan dirinya menjadi makhluk nasional yang berbudi luhur serta melahirkan kesejahteraan spiritual, mental, fisik bagi keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia.<sup>27</sup>

Urgensi madrasah diniyah menjadi semakin jelas ketika ditandai dengan lahirnya UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003. Kesadaran pemerintah akan pentingnya pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama, kemudian menetapkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai satuan pendidikan secara formal, nonformal dan informal yang dapat diselenggarakan dengan bentuk pengajaran diniyah merupakan hal yang sangat jelas bahwa madrasah diniyah telah menjadi bagian penting dalam lingkaran pendidikan untuk diketahui.<sup>28</sup>

Pendidikan Islam sebagai salah satu pembentuk moral dan pembangunan generasi muda, karenanya pendidikan harus dilaksanakan secara intensif dan terprogram, untuk memperoleh hasil yang sempurna. Pendidikan Islam juga bisa dilaksanakan di madrasah diniyah, dimana dalam madrasah diniyah ini santri dididik sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi generasi Islam yang berkualitas dan berakhlak baik. Peranan madrasah diniyah dalam pengembangan pendidikan Islam sangatlah diperlukan. Pendidikan madrasah diniyah

---

<sup>27</sup>Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam*, 79.

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

merupakan bagian dari sistem pendidikan pesantren yang wajib dipelihara dan dipertahankan karena lembaga ini telah terbukti mampu mencetak para ulama, ustad dan jajaran juga dan peserta didik yang tidak kalah berkualitas.

## C. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

### 1. Konsep Umum Pemberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.<sup>29</sup> Menurut Haidar Putra Daulay ada tiga hal yang harus diberdayakan agar pendidikan agama lebih efektif, pertama, pendidik, kedua, kebijakan, dan ketiga, manajemen.<sup>30</sup>

Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Oleh sebab itu, perhatian gerakan pemberdayaan adalah berusaha menciptakan kondisi yang menungkinkan bagi setiap orang dapat melaksanakan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Selain berhubungan dengan gerakan membangkitkan kesadaran akan

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 299.

<sup>30</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 194-196.

eksistensi seseorang atau sekelompok orang, pemberdayaan juga memusatkan perhatian pada penyebab lahirnya kendala bagi seseorang atau sekelompok untuk mewujudkan aktualisasi eksistensinya.

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan sebuah konsep pemberian wewenang kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengambil keputusan secara otonom, partisipatif dan demokratis. Pemberian wewenang tersebut sebagai strategi pembelajaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai humanitas, bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan potensi yang dapat disumbangkan bagi kehidupan bersama, baik dalam konteks kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai 3 tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.<sup>31</sup>

Penyadaran merupakan tahap pertama dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, madrasah swasta diberikan penyadaran bahwa lembaga tersebut mempunyai potensi dan kelebihan yang dapat dikembangkan menuju lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap penyadaran tersebut, misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing. Prinsip dasar

---

<sup>31</sup> Suharto, Edi. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2009) 59

pada tahap ini adalah membuat target mengerti bahwa lembaga atau organisasi perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Tahap kedua pemberdayaan adalah pengkapasitasan atau *capacity building* yang artinya adalah “memampukan”. Untuk diberikan pemberdayaan, sebuah organisasi atau lembaga harus terlebih dahulu diberi bekal pengetahuan. Misalnya sebelum sebuah madrasah diberikan tanggungjawab menjadi “madrasah unggulan” terlebih dahulu diberikan program-program pengkapasitasan untuk membuat lembaga tersebut cakap “skillfull” dalam mengelola madrasah unggulan. Proses *capacity building* meliputi tiga jenis, yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan (*training*), *workshop*, seminar, *semiloka* dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah pengkapasitasan organisasi. Pengkapasitasan organisasi dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi. Tujuan restrukturisasi organisasi antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja organisasi. Namun demikian, langkah ini kadang menimbulkan masalah baru dalam suatu organisasi, yakni rasa ketidakpuasan sebagian orang karena wewenang dan pekerjaannya dikurangi atau dipangkas. Oleh

sebab itu, dalam pengkapasitasan organisasi tersebut akan lebih baik jika organisasi ditata ulang strukturnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan lembaga, dijelaskan tugas dan wewenangnya sehingga masing-masing orang yang terlibat di dalamnya akan berbuat secara prosedural sesuai dengan aturan organisasi atau lembaga.

Tahap ketiga pemberdayaan adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit yakni memberikan kekuasaan. Pada tahap ini, lembaga atau organisasi diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki organisasi. Tujuannya adalah agar organisasi tersebut dapat mengelola program-program kegiatan yang telah mereka rencanakan dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Karena masing-masing lembaga mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda

## **2. Model Pemberdayaan Madrasah**

Prakarya masyarakat muslim Indonesia dalam memberdayakan madrasah sangat signifikan dan dominan. Sepanjang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, masyarakat muslim mengambil peran penting dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan madrasah., dalam beberapa dasawarsa terakhir, terdapat dua kecenderungan model pemberdayaan madrasah yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; tradisi dan modernisasi menuju millennium baru*, (Ciputat: Logos, 2000) 149

1. berkembangnya hasrat dalam kalangan muslim untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah untuk memberdayakan madrasah dalam berbagai aspek dengan cara “menegerikan” madrasah-madrasah swasta. Dengan semakin kuatnya kondisi negara baik dari sisi birokrasi maupun keuangan, khususnya sejak era 1970-an, negara membuka banyak akses kepada lembaga pendidikan Islam yang pada awalnya cenderung tertutup bahkan menjaga jarak dengan pemerintah. Perkembangan ini mendapatkan momentumnya sejak akhir tahun 1980, ketika negara melakukan perbaikan hubungan dengan Islam, ditandai dengan dimasukkannya sistem pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional dan adanya Surat Keputusan Bersama 3 menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itu respon kaum muslim terhadap negara cenderung hangat, dalam konteks ini pendidikan Islam semakin menggantungkan banyak harapan kepada negara untuk memberdayakan madrasah.
2. adanya kecenderungan masyarakat muslim untuk melakukan konsolidasi sumberdaya dan sumberdana untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Kecenderungan ini dapat diamati dengan berdirinya madrasah-madrasah swasta “unggulan” sebagai respon berkembangnya komunitas muslim “kelas menengah” yang memerlukan pendidikan Islam yang

berkualitas. Kondisi masyarakat muslim “kelas menengah” semakin berkembang, sehingga tuntutan menyediakan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, mendorong Departemen Agama untuk mengembangkan “madrasah-madrasah model”.

Dalam memberdayakan lembaga pendidikan Islam, termasuk di dalamnya madrasah, terdapat beberapa pandangan, antara lain:

1. Pandangan Azyumardi Azra. terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberdayaan madrasah, antara lain:
  - a) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan;
  - b) peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan madrasah yang quality oriented; dan
  - c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.<sup>33</sup>

## 2. Pandangan Mastuhu

Pemberdayaan madrasah dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan paradigma. Paradigma yang dimaksud disini adalah pemikiran yang terus-menerus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali ilmu pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masa keemasan Islam. Paradigma baru disini dikembangkan berdasarkan filsafat teocentris dan antroposentris. Prinsip yang dikembangkan dalam paradigma ini adalah tidak

---

<sup>33</sup> Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; tradisi dan modernisasi menuju millennium baru*, (Ciputat: Logos, 2000) 153

adanya dikotomi antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum.<sup>34</sup>

### 3. Pandangan Muhaimin.

Pemberdayaan madrasah dapat dilakukan dengan mengembangkan model kurikulum. Pengembangan pendidikan di madrasah tidak dapat ditangani secara parsial tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.<sup>35</sup>

Dari berbagai bentuk model pemberdayaan madrasah, tentu masing-masing madrasah mempunyai alternatif pilihan untuk mengembangkan model madrasah sesuai yang dengan potensi dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing institusi. Pembentukan tim pengembang madrasah, hasil evaluasi diri madrasah, analisa kebutuhan dan analisa harapan tentu perlu dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan model pemberdayaan madrasah. Selain analisa dengan evaluasi diri madrasah, tentu pemanfaatan modal sosial yang dimiliki madrasah perlu

---

<sup>34</sup> Mastuhu. *Memberdayakan sistem pendidikan Islam*. (Ciputat: Logos, 1999) 35

<sup>35</sup> Muhaimin, *Pengembangan kurikulum agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),185

dioptimalkan dalam kegiatan pemberdayaan madrasah. Modal sosial yang cakupannya terdiri dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas madrasah, struktur organisasi madrasah yang terbuka dan jaringan yang dimiliki madrasah merupakan elemen penting yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan madrasah.

### **3. Strategi Pemberdayaan Madrasah**

Konsep pemberdayaan dalam kajian ini dimaknai sebagai kegiatan menumbuhkan kesadaran madrasah, untuk melihat problem internal yang dihadapinya baik yang bersifat institusional, kultural maupun personal sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah. Selain kemampuan mengenal problem internal yang dihadapi madrasah, kegiatan pemberdayaan juga berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan modal yang dimiliki madrasah, baik modal sosial maupun modal kultural. Kemampuan melihat problem dan memanfaatkan modal sosial tersebut sebagai pijakan untuk mendorong madrasah melakukan perubahan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dikembangkannya. Terlebih ketika masyarakat pengguna jasa pendidikan di madrasah ibtdaiyah menaruh harapan besar pada institusi ini untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan keluarganya. Selain karena adanya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan di madrasah ibtdaiyah, Pemerintah sebagai pemegang

kebijakan pendidikan menerapkan berbagai peraturan terkait dengan mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan.<sup>36</sup>

Dengan demikian pemberdayaan diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi perbaikan organisasi maupun lembaga. Penutup Secara historis, kehadiran madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional turut memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, madrasah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang secara nyata perlu pemecahan. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki madrasah, minimnya jaringan kemitraan yang dimiliki madrasah dan lemahnya kepemimpinan kepala madrasah merupakan problem internal yang datang dari madrasah sendiri. Sementara itu problem eksternalnya adalah pembinaan yang diberikan kepada madrasah masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. Oleh sebab itu, madrasah perlu diberdayakan sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki mutu pendidikannya secara mandiri.

---

<sup>36</sup> Moh. Miftachul Choiri, *pemberdayaan madrasah dan pendidikan berbasis masyarakat* Jurnal *Tarbiyah*, Vol. 21, No. 2, Juli-Desember 2014 Issn 0854-2627